

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik adalah salah satu bagian dari ekonomi yang berhubungan dengan penyediaan layanan pemerintahan. Pelayanan masyarakat oleh sektor publik secara keseluruhan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Negara. Sektor publik merupakan manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga memiliki pertanggungjawaban yang besar terhadap publik. Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam penyelenggaraan *Good Governance* tersebut memiliki tiga prinsip atau pilar dasar yaitu, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. (Sari: 2014)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 (dalam Sari: 2014) tentang SPPN tentang Kewenangan Bappenas dan Bappeda. Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan audit kinerja dan pengawasan fungsional intern yang efektif. Akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disini bertindak sebagai pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu

hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya.
(Mahsun: 2006)

Hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan adanya audit yang dilakukan terhadap organisasi sektor publik. Akan tetapi audit yang terdapat dalam organisasi sektor publik tidak terbatas pada audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun diperlukan juga audit kinerja yang diperluas dari audit tersebut. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik (Rai, 2008).

Menurut Ulum (2012), audit kinerja merupakan bagian integral dari manajemen terhadap hasil-hasil (*managing for results*) yang meliputi perencanaan stratejik, perencanaan kinerja tahunan, anggaran berbasis kinerja, sistem pengindikator kinerja, analisis dan pelaporan capaian kinerja, serta audit kinerja.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah. (Waristiono: 2010)

Badan pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan pemerintah benar-benar sangat mendukung dan mendorong proses terwujudnya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Terdapat tiga

aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Novika: 2013).

Akuntabilitas itu sendiri memiliki tujuan untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain memberikan informasi tentang kinerja keuangan, instansi pemerintah bertanggung jawab untuk membuat Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP). Dalam penyusunan LAKIP, instansi pemerintah harus selalu memperbaiki kualitas laporannya. Menurut Laksana (2014) LAKIP yang baik adalah yang lebih banyak melaporkan penyajian data dan fakta secara analisis untuk melihat kinerja instansi pemerintah.

Salam (Peneliti senior di *Indonesia Budget Center*:2013) yang dikutip dari Tempo, mengatakan posisi inspektorat jenderal sekarang sangat lemah, dicontohkan mekanisme laporan yang harus melalui sekretaris jenderal. Akibatnya, temuan inspektorat jenderal kerap hanya sebatas laporan. Tak jarang inspektorat jenderal cuma dijadikan alat pembenaran dari proyek yang sedang dijalankan kantor kementerian. Menurut Salam inspektorat jenderal memiliki posisi penting sebagai pengendali tindakan korupsi.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik di *Indonesia Corruption Watch*, Hendri, menambahkan keterbukaanlah yang harus dimiliki inspektorat jenderal. Artinya, selain melapor, pimpinan lembaga ini harus berani secara

terbuka menyampaikan hasil temuannya kepada publik. Menurut Hendri, selama ini pemeriksaan inspektorat jenderal sulit diakses publik. Hendri mencontohkan kisruh ujian nasional beberapa waktu lalu. Hanya sebagian kecil dari hasil laporan inspektur jenderal yang disampaikan ke masyarakat.

Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Dan melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkup provinsi.

Seiring berjalannya waktu fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan latar belakang diatas beserta fenomena yang telah terjadi dapat dilihat bahwa audit kinerja, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Dengan berlatarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Audit Kinerja, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik di Kantor Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
2. Apakah pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
3. Apakah pelaporan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar pembahasan masalah tidak terlalu luas. Pada penelitian ini penulis membatasi pada audit kinerja, pengawasan fungsional, dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
2. Untuk menganalisis pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?
3. Untuk menganalisis pelaporan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas publik?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengembangan ilmu penulis terkait dengan audit kinerja sektor publik, integritas, pengawasan fungsional dan akuntabilitas publik serta mencoba untuk mengaitkan antara audit kinerja, integritas, dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam keterkaitannya dalam peningkatan akuntabilitas publik di waktu yang akan datang.

3. Kontribusi Kebijakan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari lima bab yang saling melengkapi. Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi landasan teori yang memuat teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang digunakan sesuai dengan permasalahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara penyelesaian masalah penelitian dan gambaran umum mengenai objek penelitian, pendekatan penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, cara pengambilan sampel pengujian hipotesis, pembahasan serta analisis data mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan bab-bab sebelumnya serta memberikan saran guna untuk perbaikan penelitian selanjutnya.